

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwiyanto, Agus, dkk. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Kirana, Kusuma Chandra dan Ririn Tri Ratnasari. (2017). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM)*. Yogyakarta : Gosyen Publishing.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mutyarin, Dyah dan Arif Zaenudin. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muzwardi, Ady. (2017). *Free Trade Zone menuju kawasan ekonomi Khusus di Batam, Bintan, dan Karimun*. Yogyakarta : Expert.
- Nugroho, Riant. (2015). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Salim, Agus. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Tiara Wacana
- Zaenuri, M. (2015). *Manajemen SDM di Pemerintahan* (1st ed.). Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Retrieved from <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/6252>

Jurnal dan Skripsi

- Anwar M.Si, K., & Yanti, N. (2014). Dinamika Pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. *Jom FISIP*, 1(2), 1–13. Retrieved from [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=186296&val=6444&title=DINAMIKA PELAKSANAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS \(FREE TRADE ZONE\) BATAM](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=186296&val=6444&title=DINAMIKA%20PELAKSANAAN%20KAWASAN%20PERDAGANGAN%20BEBAS%20DAN%20PELABUHAN%20BEBAS%20(FREE%20TRADE%20ZONE)%20BATAM)
- Azzahra, D. F. (2015). Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Hambatan Free Trade Zone di Batam. *Jom FISIP*, 2(2), 1–14. Retrieved from [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=349500&val=6444&title=KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI HAMBATAN FREE TRADE ZONE DI BATAM \(STUDI KASUS : HUTAN LINDUNG\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=349500&val=6444&title=KEBIJAKAN%20PEMERINTAH%20INDONESIA%20DALAM%20MENGATASI%20HAMBATAN%20FREE%20TRADE%20ZONE%20DI%20BATAM%20(STUDI%20KASUS%20:HUTAN%20LINDUNG))
- Bari, S. (2017). *Analisis Pengaruh Pendidikan Pengeluaran Pemerintah dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Retrieved from <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/15975>
- Gunandi, Irawan, A., Ratnasari, S. L., & Wibisono, C. (2015). Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening antara Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 3(1), 56–65. Retrieved from <http://p2m.polibatam.ac.id/wp-content/uploads/2016/02/7.-Jurnal-Adi.pdf>
- Hartadi, B. S. (2017). *Evaluasi Kinerja Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015*. Universitas Muhammadiyah

- Yogyakarta. Retrieved from
<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11895>
- Ikhwan, C. (2018). *Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Daerah Tahun 2016*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Retrieved from
<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/19959>
- Kurniawan, W. (2017). Free Trade Zone sebagai Salah Satu Wujud Implementasi Konsep Disentralisasi. *Jurna Selat*, 4(2), 160–189. Retrieved from
<http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/196>
- Maulana, A. (2016). *Analisis Kinerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Dalam Mengatasi kemacetan lalu Lintas Tahun 2012-2015*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Retrieved from
<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/2853>
- Murti, M. sapta. (2015). Urgensi Otonomi Khusus Batam Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. *Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(2), 215–235. Retrieved from
<http://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/viewFile/41/43>
- Muzwardi, A. (2015). The Analysis of Network Governance in the Investment Development of Free Trade Zone and Free Port (KPBPB) Batam, 19(2), 145–155. Retrieved from <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/9827>
- Oktaviani, H. (2017). *Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara (Study Kasus tentang SKP dan PKP di Badan Pertanahan Kabupaten Bantul Tahun 2015*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Retrieved from
<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/16028?show=full>
- Pradhipta, R. M. W. A. (2016). *Sinergi Kawasan Perdagangan Dan Pariwisata Dalam Pembangunan Destinasi Studi Kasus : Pengembangan Kawasan Wisata Nongsa, Batam*. Universitas Gadjah Mada. Retrieved from
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=84118&obyek_id=4
- Pramudya, M. T. (2015). *Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Retrieved from
<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/16676>
- Puspita, G. I. (2016). Pengaruh Implementasi Special Economic Zone Batam Bintan Karimun Terhadap Peningkatan Industri pariwisata DiKabupaten Bintan Pada Tahun 2012-2014. *Jurnal Fisip*, 3(1), 1–15. Retrieved from
<https://www.neliti.com/id/publications/33184/pengaruh-implementasi-special-economic-zone-batam-bintan-karimun-terhadap-pening>
- Rade, Y. L. (2014). *Eveluasi Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang*. Retrieved from
<http://jurnal.umrah.ac.id/?p=3213>
- Sakir. (2013). *Akselerasi Reformasi Birokrasi Kualitas Pelayanan Publik (Studi penelitian : Pendistribusian dan Profesionalisasi Pelayanan Rusunawa dan TRANS JOGJA di DIY Tahun 2012)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Retrieved from
<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/9519>
- Yealta, D. (2015). Implikasi Free Trade Zone Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia (Suatu Kajian Bisnis Internasional Di Provinsi Kepulauan Riau)
Pendahuluan Perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami proses
perlambatan dalam pertumbuhannya setelah dalam beberapa t. *Jurnal
Transnasional*, 7(1), 1851–1867. Retrieved from
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=440306&val=2274&title=Implikasi Free Trade Zone Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia>
Zaenuri, M. (2015). *Manajemen SDM di Pemerintahan* (1st ed.). Yogyakarta:
LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Retrieved from
<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/6252>

Internet

<http://bappeda.kepriprov.go.id/index.php/data-informasi/potensi-daerah/47-potensi-daerah/196-profil-alam-provinsi-kepulauan-riau> diakses 29 September 2018.

<https://kepri.antaranews.com/berita/47567/bupati-karimun-tidak-ada-perusahaan-yang-tutup> diakses 29 September 2018.

http://tataruang.atr-bpn.go.id/Bulletin/upload/data_artikel/profil%20wilayah..BBK%20edisi%202.pdf diakses 29 September 2018.

http://www.academia.edu/4244798/Draf_Lap_Akhir_Renstra_Kawasan_Perdagangan_Bebas_dan_Pelabuhan_Bebas_Karimun diakses 29 September 2018

<https://karimunkab.go.id/2016/10/26/gambaran-umum-demografi-kab-karimun/> diakses 29 September 2018

<https://karimunkab.go.id/2016/10/23/gambaran-umum-daerah-kabupaten-karimun/> diakses 29 September 2018

<https://karimunkab.go.id/visi-dan-misi/> diakses 29 September 2018

Yudha, 2017. Indeks Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karimun Terus Alami Penurunan. <https://batamtoday.com/home/read/118739/Indeks-Pertumbuhan-Ekonomi-Kabupaten-Karimun-Terus-Alami-Penurunan> diakses 2 Januari 2019

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Portal dan Situs WEB Badan Pemerintahan.

Peraturan Dewan Kawasan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

Lain-lain

Laporan tahunan BP Karimun Tahun 2017

Rencana Strategis BP Karimun Tahun 2013-2017